

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MD) DI KECAMATAN SIAU TIMUR¹

Oleh : Octavianus Katuhu²

ABSTRAK

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. Tanpa kinerja pegawai yang maksimal, kegiatan dalam suatu organisasi tidak mungkin akan berjalan. Oleh karena itu, dalam upaya pelaksanaan organisasi ke arah yang lebih baik, maka perlu diketahui karakter atau sifat dasar manusia dalam pengelolaan atau hasil pencapaian organisasi tersebut. Sumber daya terpenting bagi organisasi adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat dan kreatifitas mereka pada organisasi. Karena itu kinerja organisasi baik itu organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah, tidak terlepas dari kinerja individu. Motivasi terbentuk dari sikap pegawai dalam menghadapi situasi kerja di tempat kerja baik itu dinas atau instansi pemerintah maupun perusahaan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri/pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi maupun pegawai itu sendiri. Sikap mental pegawai yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. Kinerja yang merupakan gambaran umum mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi maka antara kinerja dan motivasi memiliki hubungan yang sangat erat karena kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi memiliki hubungan dengan lingkungan kerja sehingga untuk meningkatkan hasil kerja maka motivasi memiliki pengaruh penting terhadap kinerja pegawai karena berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan juga oleh motivasi dari pimpinan karena dengan adanya daya perangsang dari atasan kepada bawahan maka akan membuat pegawai menjadi lebih tersemangati untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kinerja Pegawai

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan selalu dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan ini tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² MAhasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) sebagai salah satu program pembangunan partisipatif dengan model pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) memberikan bantuan hibah berupa pembangunan sarana dan prasarana, bantuan dana bergulir untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) menekankan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang partisipatif. Bantuan PPK mengutamakan pembangunan yang dilakukandan dikelola langsung oleh masyarakat lokal khususnya wilayah kecamatan dalam wadah yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal di tingkat wilayah kecamatan dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Melalui PNPM-MD, bantuan langsung berupa hibah bergulir diberikan melalui kepala desa dikoordinasi oleh camat dengan peruntukan bagi investasi sosial, investasi ekonomi yang menghasilkan dana bergulir dan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal (*capacitybuilding and institution building*).

Pada dasarnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai (*open menu*), terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Lingkup kegiatan PNPM-MD pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi, serta melibatkan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan usulan apapun yang sesuai kebutuhannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) sebagai sebuah program yang bertujuan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, menjadi penting sebagai sebuah kebijakan negara. Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) mencakup aspek kegiatan ekonomi, kegiatan fisik, penguatan kelembagaan dan aspek pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah program.

Mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) bukanlah kegiatan satu kali. Evaluasi kinerja adalah proses yang mencakup perencanaan sejak awal dan memeliharanya secara teratur. Perencanaan kinerja membutuhkan waktu dan dituntut pula satu pemikiran. Untuk melakukan evaluasi proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) dilakukan kajian tentang program itu sendiri, identifikasi pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan, kajian tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam PNPM-MD, pemberdayaan masyarakat dalam PNPM-MD dan analisis kesesuaian konsep dan pelaksanaannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Siau Timur dilaksanakan mulai Tahun 2007 s/d 2013 berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) mengutamakan pentingnya mekanisme perguliran dana bantuan langsung yang dilakukan melalui lembaga keuangan

milik masyarakat yang disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). Penggunaan dana melalui PNPM-MD ini dibatasi oleh persyaratan ketat. Sejak diimplementasikan PNPM-MD di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD), untuk saat ini kenyataannya yang nampak belum berhasil menghapus kemiskinan yang ada.

Pada akhirnya, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001, dengan penguatan ekonomi produktif lokal diharapkan benar-benar memberikan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal. Dari hal tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan kajian mendalam tentang “*Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro*”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program PNPM mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pelaksanaan program PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas program PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga terkait dalam hal ini pemerintah kecamatan agar lebih mengoptimalkan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) dalam proses perencanaan pembangunan sampai pada proses evaluasinya bagi pengembangan Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro.
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya, dan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, ”Apa perbedaan yang dibuat?”. Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn, 2000:36)

Mustopadjaja (2005:45) mengatakan bahwa : “evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement* tertentu)”. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan,

seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, instrumen kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain.

Menurut Wahab (2002:13), merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternatif yang tersedia.

Gunawan (2007:138), mengatakan indikator keberhasilan kebijakan untuk mengukur pelaksanaan kebijakan adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapi administrasi kelompok lain dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Islamy (2003:114-115), membedakan antara "*policy impact/outcome*" dan "*policy output*". *Policy impact/outcome* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Sedangkan *policy output* ialah dari apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah. Dari pengertian tersebut maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan terjadi yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan

Evaluasi proses adalah menilai apakah proses sudah sesuai dengan prosedur yang disepakati atau belum. Evaluasi kebijakan mencakup tujuan, deskripsi, pengukuran, dan dampak, sedangkan evaluasi lingkungan formulasi kebijakan adalah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan mengapa kebijakan dilakukan seperti itu. (Nugroho, 2008:186-202).

Evaluasi atau penilaian terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan (Dunn, 2000:608) : Adanya sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode *forecasting* (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (*feed back*) bagi agenda setting berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (*policy assesment*).

Secara sederhana proses kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan memproses kepentingan publik menjadi sebuah keputusan kebijakan untuk dilaksanakan. Dari teori evaluasi kebijakan tersebut akan dipakai dasar untuk mengevaluasi Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro.

B. Konsep Program PNPM Mandiri

PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DKT) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya dan PPIP yang biasa disebut dengan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri sampai 2008 juga masih diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Secara umum, tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dan secara khusus dapat diatur sebagai berikut;

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemen, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Dasar peraturan perundangan sistem yang digunakan adalah:

- a. UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
 - c. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - d. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan.
2. Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan pembangunan terkait:
- a. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perimbangan Nasional (SPPN).
 - b. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional 2004-2009.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Rangkaian program PNPM Mandiri Pedesaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memulai dari (1) proses perencanaan program kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, (2) proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, dan (3) proses pengawasan kegiatannya. Seluruh rangkaian program PNPM Mandiri Pedesaan ini secara ideal harus dapat memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana utamanya.

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan.

Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal tiap daerah, dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Pedesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 2 jenis kegiatan yang meliputi:

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari bahasa Inggris, dimana *power* diartikan sebagai kekuasaan dan kekuatan. Menurut Robert Dahl (1973:50), pemberdayaan diartikan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol, manusia selaku individu dan kelompok yang berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Menurut Prijono (1996:123), *Power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment*

dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Priyono, 1996:86).

Sutrisno (2005:74) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*)
2. Partisipasi (*Participation*)
3. Konsep keberlanjutan
4. Keterpaduan
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan

Kartasmita (1995:139) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Sumodiningrat (2002, dalam Sulistyanyingsih, 2004: 82) Pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Wiranto (1999), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Gany (2001) juga berpendapat bahwa konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.

3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menekankan tujuan eksploratif, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan bagaimana fenomena suatu kegiatan terjadi dalam masyarakat yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami permasalahan manusia (sosial) dengan cara menjelaskan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Nazir; 1999:34). Dalam penelitian ini pemahaman yang digunakan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yaitu wilayah Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro.

C. Sumber Data

Mengenai jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, Data yang diperoleh penulis dari responden yang berupa data yang menyangkut pendapat responden terhadap setiap pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner.
- b. Data Sekunder, Data yang diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membawa dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang bersumber dari buku-buku, majalah dan koran-koran guna mendapatkan bahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : masyarakat penerima bantuan ekonomi, kelompok masyarakat yang dimungkinkan menerima bantuan non ekonomi (prasarana), Tokoh masyarakat dapat diambil dari unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang dipandang representatif dalam kegiatan PNPM-MD, serta pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Kuesioner diberikan sebanyak 20 (duapuluh) orang yang diambil dari masing-masing desa 2 (dua) orang dengan berdasar jumlah desa di Kecamatan Siau Timur 10 (sepuluh) desa, dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat, proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM-MD yang terjadi di masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Dan penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian.

Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

- Observasi (pengamatan)
- Wawancara
- Studi Kepustakaan

E. Teknik Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (1992:16).

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data
2. Tahap penyajian data
3. Tahap Verifikasi data/penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program PNPM Mandiri Dalam Peningkatan Prasarana Kehidupan di Kecamatan Siau Timur

Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri dalam meningkatkan prasarana kehidupan di Kecamatan Siau Timur pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dalam artian peningkatan prasarana kehidupan di Kecamatan Siau Timur yang secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengangkutan hasil produksi pertanian melalui salah satu program kerja PNPM Mandiri yakni perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik). Serta, memperbaiki kesejahteraan masyarakat (kesehatan masyarakat) melalui program kerja PNPM Mandiri yakni Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu.

Hal itu tertuang di dalam prinsip-prinsip pokok PNPM Mandiri yang terdiri dari :

1. Transparansi dan Akuntabilitas
2. Desentralisasi
3. Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin
4. Otonomi
5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat
6. Prioritas Usulan
7. Kesenjangan dan Keadilan Gender
8. Kolaborasi
9. Keberlanjutan

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri juga memiliki prinsip lainnya, sebagaimana di utarakan oleh Drs. Wilman Pangulimang selaku Camat Siau Timur, yakni :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan di arahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Agar tujuan umum dari PNPM Mandiri seperti meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang ada di Kelurahan. Serta sejalan dengan visi dan misi dari PNPM itu sendiri, adapun visi misi PNPM yang dikemukakan oleh Camat Drs. Wilman Pangulimang Siau Timur di kediaman beliau sebagai berikut:

“Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin”.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Adapun misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

1. Proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka proses peningkatan prasarana kehidupan di Kecamatan Siau Timur melalui program PNPM Mandiri strategi yang digunakan adalah menjaring aspirasi masyarakat dan peningkatan prasarana kehidupan masyarakat dalam artian perbaikan infrastruktur jalan tani dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu di sekitar Kecamatan Siau Timur sebagai target atau sasaran utama.

Adapun sasaran yang lain adalah menguatkan system pembangunan partisipatif masyarakat, untuk melakukan kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan jenis usulan agar yang diusulkan atau diajukan bisa didanai atau dapat direalisasikan oleh program itu sendiri, karena kegiatan masyarakat yang diusulkan juga bisa ditolak atau tidak diterima dan tidak bisa didanai oleh PNPM Mandiri. Adapun usulan kegiatan yang dapat didanai atau diterima dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siau Timur dapat diklasifikasikan atas dua jenis kegiatan meliputi:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana (perbaikan infrastruktur jalan tani) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Siau Timur.
- b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan (pembangunan jamban sehat) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di sekitar Kecamatan Siau Timur.

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar kelurahan/desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, didukung sumberdaya yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan. Prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Siau Timur dalam bidang kesehatan dan prasarana kehidupan. PNPM tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan (*negative list*). Pelarangan ini didasarkan atas komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin.

Ini menunjukkan bahwa, seluruh usulan yang didanai PNPM-MP merupakan usulan masyarakat, yang dipetakan langsung oleh mereka sesuai dengan prioritas kebutuhannya. PNPM-MP memiliki tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Jika dilihat dari kondisi jalan dan jamban masyarakat yang kurang mampu, sudah sewajarnya pemerintah melalui PNPM Mandiri meluncurkan program yang berhubungan dengan perbaikan prasarana di Kecamatan Siau Timur guna terciptanya peningkatan prasarana kehidupan di Kecamatan Siau Timur.

Sebagai langkah dari keseriusan dari masyarakat dan pemerintah beberapa tokoh masyarakat bersama ketua PNPM Mandiri Kecamatan Siau Timur beserta staff kecamatan mengadakan pertemuan yang membahas mengenai masalah perbaikan prasarana yang mencakup dua hal yaitu, perbaikan jalan tani dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan akhirnya setelah mereka sepakat, kemudian dimulailah program dari PNPM Mandiri ini di Kecamatan Siau Timuryang murni merupakan aspirasi dari masyarakat.

Dari hasil penelitian, bisa dikatakan bahwa keberadaan Program PNPM Mandiri di kabupaten Siau Tagulandang Biaro mendapat sambutan yang besar dari pemerintah setempat. Bahkan sebagai komitmen dalam menindaklanjuti Program PNPM Mandiri ini, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Siau Tagulandang Biaro telah menetapkan dana cost sharing bagi PNPM Mandiri untuk tahun anggaran 2010 sebesar 20% dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Program PNPM Mandiri yang ada di Kecamatan Siau Timur terpusat kepada pembangunan prasarana yang bersifat fisik. Karena, di Kecamatan Siau Timur yang harus diutamakan yaitu pembangunannya di mana jalan dan prasarana-prasarana yang ada belum memadai. Oleh karena itu program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur ini memiliki presentase mencapai 100 % untuk pembangunan fisik (prasarana). Sedangkan, untuk yang non fisik belum ada sama sekali.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur

Pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam tujuan meningkatkan prasarana kehidupan masyarakat di Kecamatan Siau Timur mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung penuh kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri. Berikut bentuk partisipasi dari masyarakat di Kecamatan Siau Timur ini:

- a. Kesiediaan dalam meluangkan waktu dan tenaga
- b. Kesiediaan dalam menyiapkan bahan/materi

Menurut salah satu masyarakat setempat Bapak Petrus Bawekes yang mengemukakan bahwa:

“dengan adanya program PNPM Mandiri yang sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari harinya, inilah saatnya kami membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama. Melalui program ini kami selaku masyarakat tidak akan segan dalam memberikan bantuan selama bantuan itu masih bisa kami lakukan”.

Dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh para responden mereka semua sependapat bahwa kehadiran program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Siau Timur itu sendiri. Di samping itu mereka semua juga telah berusaha untuk bekerja sama sebaik mungkin, hal itu terlihat dari bentuk partisipasi mereka yang tidak segan untuk memberikan bantuan yang signifikan guna terlancarkannya program PNPM Mandiri yang mencakup 2 hal yaitu, perbaikan jalan tani serta pembangunan jamban sehat keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemeliharaan Hasil

Setelah terlaksananya program PNPM Mandiri yang mencakup perbaikan jalan tani serta pembangunan jamban sehat keluarga, hal lain yang masih diperlukan adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan hasil. Masyarakat Kecamatan Siau Timur selaku pihak yang diberi kewajiban untuk menjaga dan memelihara hasil dari program PNPM Mandiri telah melakukan beberapa tindakan pencegahan agar nantinya hasil dari program PNPM Mandiri dapat bertahan lama. Berikut beberapa proses partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil kegiatan PNPM Mandiri:

- a. Memberi larangan untuk angkutan yang beroda lebih dari 4 untuk melintasi jalan yang nota bene merupakan hasil dari program PNPM Mandiri.
- b. Tanpa ragu memasang atau membuat polisi tidur di atas jalan yang telah di perbaiki
- c. Rutin membersihkan parit, agar nantinya tidak terjadi banjir yang kemungkinan besar dapat merusak jalan
- d. Merawat dan memelihara jamban sehat keluarga yang di bangun oleh PNPM Mandiri.
- e. Menerapkan tata cara hidup bersih, yaitu masyarakat yang biasanya buang air di semak-semak akhirnya dapat memaksimalkan jamban sehat keluarga yang ada.

Seperti yang terlihat di atas, program PNPM Mandiri akhirnya menjadi acuan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Siau Timur guna menuju ke kehidupan yang lebih baik, di era modernisasi ini apabila seseorang atau sekumpulan orang tidak mampu bersaing dengan yang lain maka, hanya 1 hal yang akan di peroleh yaitu ketertinggalan nyata. Sedangkan, dengan adanya PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur senantiasa memberikan kesadaran diri bagi masyarakat yang dulunya bersikap acuh tak acuh kini sudah mulai mau saling bekerja sama untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan.

Seperti yang di utarakan salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu Bapak A. Tampilang yang mengemukakan bahwa :

“program PNPM Mandiri telah terlaksana dan sukses, kini saatnya bagi kita untuk merawat dan memelihara apa yang telah kita dambakan dalam beberarap tahun yang lalu. Tidak akan ada hal yang bertahan abadi, tapi setidaknya mari kita usahakan agar hal tersebut bisa menjadi lebih tahan lama. Apalagi tidak adasalahnya kan kalau kita saling membantu untuk kebaikan kita bersama”.

Di samping itu, salah satu staff kelurahan yaitu Ibu Hertensi Tinahu mengemukakan bahwa :

“program PNPM Mandiri merupakan suatu berkah bagi masyarakat di Kecamatan Siau Timur, karena dengan adanya PNPM ini masyarakat asli Kecamatan Siau Timur yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dapat memperoleh kemudahan dalam proses pengangkutan hasil produksi serta memberikan banyak manfaat yang lain bagi masyarakat Kecamatan Siau Timur”.

B. Efektivitas Program PNPM Mandiri Dalam Peningkatan Prasarana Kehidupan di Kecamatan Siau Timur

Program PNPM Mandiri adalah program yang sangat membantu bagi kehidupan masyarakat golongan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu program-program yang dikeluarkan oleh PNPM Mandiri haruslah efektif dan mengenai sasaran atau target yang ingin di capai. Berikut poin yang ingin di capai atau tolak ukur dalam efektifnya program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur, yaitu:

- a. Peningkatan pendapatan
Peningkatan pendapatan yang dimaksud di sini adalah terciptanya sebuah situasi di mana pendapatan dari para petani yang ada di sekitar wilayah perbaikan jalan tersebut meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perbaikan jalan tani tersebut, maka proses dalam pengangkutan hasil produksi pertanian dan proses pengangkutan hal-hal lain

yang berkaitan dengan pertanian masyarakat di Kecamatan Siau Timur menjadi jauh lebih mudah. Oleh karena itu, dengan kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat senantiasa dapat meningkatkan pendapatan dari para petani setempat. Karena, mereka yang dulunya mengangkut hasil produksinya secara manual kini mulai memanfaatkan teknologi yang ada. Di samping itu, para petani juga yang dulunya menggunakan binatang seperti kerbau untuk membajak sawah kini sudah mulai menggunakan mesin (traktor). Hal ini tentunya sangat membantu para petani dalam meningkatkan pendapatannya.

Seperti yang di utarakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai petani yaitu Bapak Jhon Medea yang mengemukakan bahwa :

“sejak adanya program PNPM Mandiri kami selaku orang yang mencari nafkah di area persawahan sangat merasa terbantu dengan adanya perbaikan jalan tani ini. Karena kami yang dulunya kesulitan dalam pengangkutan hasil produksi kini sudah mulai merasakan dampak positif dari program PNPM Mandiri ini”.

b. Mempermudah akses antara jalan poros persawahan

Efektifitas yang dimaksud di sini adalah terciptanya suatu situasi atau kondisi di mana akses atau jalur yang di tempuh ke jalan persawahan akan lebih mudah dilalui. Hal ini disebabkan adanya perbaikan jalan yang menghubungkan antara jalan poros dengan jalan ke persawahan. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat yang ingin atau mempunyai aktivitas di area persawahan. Di samping itu, akan mempermudah pula jika adanya keluarga yang berkunjung ke rumah salah satu masyarakat yang bermukim di sekitar area persawahan itu sendiri. Di sisi lain, dengan adanya perbaikan jalan tersebut turut pula menjadikan wilayah itu sebagai daerah yang strategis. Dampak yang paling nyata dan begitu signifikan adalah ketika harga tanah yang dulunya rendah kini melonjak drastis.

Harga tanah di sekitar area persawahan itu melambung tinggi. Di tambah lagi dengan adanya perumahan yang dibangun di sekitar lokasi persawahan itu sendiri. Sehingga terciptalah suatu kondisi di mana harga tanah dari para pemilik tanah di sekitar lokasi persawahan tersebut menjadi incaran para pebisnis, tentunya bukan dengan harga yang murah.

Berikut ini adalah salah satu argumen dari salah satu tokoh masyarakat yang bermukim di sekitar area persawahan tersebut, yaitu Bapak Patras, yang mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya perbaikan jalan yang menghubungkan antara jalan poros persawahan sangat memudahkan kami yang bermukim di area tersebut, di samping itu, perbaikan jalan tersebut juga telah memberikan dampak positif, misalnya harga tanah yang melambung. Dengan demikian, masyarakat di sini tentunya dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal”.

c. Peningkatan dari segi kesehatan

Peningkatan yang dimaksudkan di sini adalah suatu kondisi di mana kondisi kesehatan di Kecamatan Siau Timur ini meningkat. Dengan kata lain, dengan adanya program dari PNPM Mandiri yang membangun jamban sehat keluarga buat keluarga yang kurang mampu akhirnya secara langsung dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini terlihat dari masyarakat yang dulunya buang air sembarangan kini sudah harus terbiasa dengan buang air di wc (kakus) yang nota benanya adalah pola hidup bersih yang sesungguhnya. Di samping itu dengan adanya jamban sehat keluarga sudah mencerminkan bahwa masyarakat di Kecamatan Siau Timur sudah mau belajar untuk hidup sehat layaknya orang-orang perkotaan.

Hal itu di tunjang oleh pendapat salah seorang tokoh masyarakat yaitu Ibu Sriyanti yang mengemukakan bahwa:

“semenjak adanya jamban sehat keluarga yang di salurkan oleh pemerintah, sangat membantu sekali bagi keluarga saya. Kami yang dulunya gusar ketika mau buang air harus numpang ke tetangga akhirnya kini kami dapat tenang karena kami tidak lagi harus menumpang ke wc keluarga lain untuk buang air. Hal inilah yang kami damba-dambakan dari dulu, hidup sehat seperti orang – orang yang berkecukupan”.

Seperti yang tercantum dalam beberapa ukuran efektifitas program PNPMMandiri yang ada di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dengan kata lain, PNPMMandiri begitu banyak memberikan pengaruh-pengaruh yang positif bagi kelangsungan prasarana hidup di Kecamatan Siau Timur.

C. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Program PNPMMandiri

Di dalam sebuah program kerja atau kegiatan tentunya ada faktor-faktor yang mendorong dan ada pula faktor-faktor yang menghambat. Hal inilah yang akan kita ketahui bersama. Di mana kita mulai dengan faktor-faktor yang mendorong program PNPMMandiri di Kecamatan Siau Timur :

1. Faktor-Faktor Yang Mendukung Program PNPMMandiri di Kecamatan Siau Timur

Adanya sosialisasi program PNPMMandiri maksudnya di sini adalah dengan adanya sosialisasi tentang program PNPMMandiri yang akan dilaksanakan tentunya akan memberi kejelasan kepada masyarakat tentang hal-hal apa saja yang akan dibenahi oleh pemerintah melalui program PNPMMandiri. Karena salah satu prinsip dasar dalam PNPMMandiri adalah “keterbukaan”. Apabila dalam suatu proses pelaksanaan program tidak ada yang namanya keterbukaan maka akan diragukan tingkat efektivitas serta keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan tersebut. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kelancaran dan kesuksesan dari program tersebut dalam hal efektifitas dari program itu sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu Ibu Refantiani mengemukakan bahwa:

“program PNPMMandiri sudah sewajarnya mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Di lain hal, dengan adanya sosialisasi program PNPMMandiri yang ingin di laksanakan akan lebih memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah”.

SDM (sumber daya manusia) sebagai pelaku PNPMMandiri. Yang di maksud di sini adalah dengan adanya program PNPMMandiri secara umum akan memperbaiki atau memaksimalkan sumberdaya manusia dari para pelaku PNPMMandiri yang bertujuan untuk memberikan bayangan atau menciptakan masyarakat-masyarakat yang berkompeten dan berguna bagi keberlanjutan dari program-program PNPMMandiri berikutnya. Dengan kata lain dengan adanya program ini masyarakat dan pemerintah di harapkan saling bekerja sama dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya di Kecamatan Siau Timur ini. Yang secara tidak langsung menjelaskan tujuan utama dari program PNPMMandiri ini tidak lain adalah kembali ke masyarakat disekitar Kecamatan Siau Timur. Seperti yang dikatakan salah satu staf kelurahan yaitu Bapak Hendra Pomantow yang mengemukakan bahwa:

“SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu modal yang penting dalam hidup, maka dari itu di harapkan SDM dari masyarakat di Kecamatan Siau Timur ini dapat menunjang keberhasilan dari terlaksananya program PNPMMandiri ini.

Hal yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan program dari PNPMMandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam ruang lingkup kelurahan itu sendiri. Jika tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi maka, tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Siau Timur guna menyukseskan program PNPMMandiri sangat tinggi, oleh karena itu program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri ini sangatlah diharapkan guna tercapainya tujuan yang diinginkan bersama yakni tercapainya kata efektif dalam hal proses penyelenggaraan program dan hasilnya kelak. Seperti yang di katakana salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Siau Timur yaitu Nus Ansyu bahwa:

“tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi sejauh mana kesuksesan program yang akan kita jalankan, oleh karena itu, partisipasi masyarakat dari masyarakat di Kecamatan Siau Timur yang begitu tinggi telah mampu membawa program dari PNPM Mandiri ini ke tingkat yang semestinya”.

2. Faktor-Faktor Penghambat Program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur

Di dalam suatu program yang ingin dijalankan permasalahan dana yang selalu muncul sebagai musuh utama. Di dalam program PNPM Mandiri hal itu kembali muncul dan menciptakan suasana di mana dana yang semestinya sudah cair nyatanya terlambat. Nah, hal inilah yang menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Di Negara kita ini sudah sering terjadi di mana suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat akhirnya kembali mendapatkan kesulitan dalam hal atau masalah dana yang seringkali terlambat atau bermasalah. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran dari pemerintah akan begitu pentingnya program yang membutuhkan dana tepat waktu guna tercapainya hasil yang diinginkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah demi kesejahteraan rakyat semata. Oleh karena itu seharusnya pemerintah berkaca dalam berbagai kejadian yang sama yang terjadi bertahun tahun lalu demi terciptanya kesejahteraan dan tercapainya suatu hal yang dinamakan efektivitas.

Berikut pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Yoan Betah yang mengemukakan bahwa :

“Bukan Indonesia namanya kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Apalagi yang dibahas di sini mengenai masalah dana yang menggiurkan bagi kalangan atas yang terkait”.

Hal itu kemudian semakin dilengkapi oleh pernyataan dari Bapak Lurah Kecamatan Siau Timur yang berbagi kepada peneliti tentang apa yang ada dibenaknya mengenai permasalahan dana dalam program ini. Berikut pernyataan dari Bapak Jendri Maabuat, SH yang mengemukakan bahwa:

“permasalahan dana dalam hal ini sudah sering terjadi di Negara kita, dana yang semestinya sudah cair hari ini, eh malah cair sebulan kemudian. Namun, yang kami utamakan di sini bukanlah suatu perkara melainkan upaya untuk menyukseskan program ini, maka dari itu semuanya butuh pengorbanan”.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur sempat mengalami kemogokan karena musim yang tidak mau bersahabat. Seperti yang kita ketahui bersama membangun dengan hujan sebagai gangguan sama saja dengan menghancurkan bangunan itu sendiri. Maka, tidak ada jalan lain program ini sempat terhambat selama sebulan gara-gara hujan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kelalaian dari pemerintah setempat selaku pelaksana program yang memulai suatu program pembangunan yang berbau fisik dalam periode musim penghujan yakni bulan oktober dan November yang notabene merupakan waktu hujan. Seharusnya, Pemerintah lebih jeli dalam masalah penentuan waktu pelaksanaan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat program PNPM Mandiri ini yang bertujuan meningkatkan prasarana Kehidupan di Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Hal itu di lengkapi dengan penjelasan dari ketua PNPM Mandiri Kecamatan Siau Timur, yaitu Bapak Max Tantu yang mengemukakan bahwa:

“musim penghujan merupakan salah satu hambatan tersendiri bagi kelancaran program PNPM Mandiri ini. Oleh karena itu kami hanya bisa bersabar dalam menghadapi hambatan

ini. Tapi intinya program ini tetap berjalan sesuai rencana meskipun agak terlambat waktu pelaksanaannya”.

Seperti yang di lihat di atas, hal itulah yang tergolong di dalam faktor-faktor yang menunjang tersukseskannya program PNPM Mandiri dan faktor-faktor yang menghambat jalannya program dari PNPM Mandiri ini. Namun seperti yang kita ketahui bersama hal itu dapat berjalan lancar namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terlaksananya program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur harusnya menjadi cerminan bagi kita semua, di mana meskipun terkendala oleh keterlambatan pencairan dana serta kesalahan pemilihan waktu pelaksanaan, namun program ini dapat berjalan lancar dan berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi kelangsungan kehidupan di Kecamatan Siau Timur dan sekitarnya. Dengan adanya kemauan dari Pemerintah dan masyarakat setempat yang saling bahu membahu dalam tersukseskannya program dari PNPM Mandiri ini, maka semua hambatan tidak akan menjadi sebuah masalah yang berarti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya program PNPM Mandiri secara umum akan memperbaiki atau memaksimalkan sumberdaya manusia dari para pelaku PNPM Mandiri yang bertujuan untuk memberikan bayangan atau menciptakan masyarakat-masyarakat yang berkompeten dan berguna bagi keberlanjutan dari program-program PNPM Mandiri berikutnya.
2. Keberhasilan program dari PNPM Mandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam ruang lingkup kelurahan itu sendiri. Jika tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi maka, tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Siau Timur guna menyukseskan program PNPM Mandiri sangat tinggi, oleh karena itu program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Di dalam melaksanakan program PNPM Mandiri menunjukkan bahwa permasalahan dana muncul sebagai musuh utama. Di dalam program PNPM Mandiri hal itu kembali muncul dan menciptakan suasana di mana dana yang semestinya sudah cair nyatanya terlambat. Nah, hal ini lah yang menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati.
4. Program PNPM Mandiri di Kecamatan Siau Timur sempat mengalami kemogokan karena musim yang tidak mau bersahabat. Seperti yang kita ketahui bersama membangun dengan hujan sebagai gangguan sama saja dengan menghancurkan bangunan itu sendiri. Maka, tidak ada jalan lain program ini sempat terhambat selama sebulan gara-gara hujan.

B. Saran

Berdasarkan keimpulan dari penelitian dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk penyelenggaraan program PNPM selanjutnya seharusnya perlu perhatian yang lebih dari pemerintah di mana proses pengaliran dananya tersalurkan dengan benar dan tepat waktu.
2. Saran bagi pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro khususnya di Kecamatan Siau Timur seharusnya menyertakan beberapa proses pemberdayaan masyarakat di dalam program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Kecamatan Siau Timur. Contoh, pemberian keterampilan bagi IRT untuk digunakan sebagai bekal dalam membuka suatu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

3. Program PNPM mandiri di Kecamatan Siau Timur ini seharusnya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Jangan hanya berpusat kepada program fisik, melainkan juga harus ke program yang bersifat non fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Danin, Sudarwan, 2000. *Pengantar Study Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, N William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua: Gadjah Mada University Press.
- Gany R.A. 2001. *Kemandirian Lokal*. Hasanuddin Press. Makassar.
- Islamy, M. Irfan, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Milles, Matthew dan Michael Huberman. 2010, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadjaja, 2005. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*, Jakarta : Elexmedia Komputindo.
- Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Sutrisno, D., 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro : Fakultas Teknik, Jurusan Planologi.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Sulistiyani, A.T., 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Sulistiyani, A.T., 2005, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Gava Media
- Wahab, Solichin, Abdul, 2000, *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Inpres Nomor 2 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.